



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisatria, Randhi. 2015. "Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi." *Universitas Pendidikan Indonesia*. Hal 60-85.
- Aisyah. 2012. "Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang." *Universitas Maritim Raja Ali Haji*. Hal 1-21.
- Alfian, Rahmat. 2010. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Prataman Surabaya Krembangan. *Hal 1-19*.
- Astuti, Wati Aris & Rusdianto Heru. 2014. "Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan 21." *UniversitasKomputer Indonesia*. Hal 1-17.
- Divianto. 2013. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Baturaja." *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi*. Vol.3.No.3
- Direktur Jenderal Pajak. Keputusan Direktur Jenderal; Pajak Nomor KEP-1616/PJ/2001 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak.
- Direktur Jenderal Pajak. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intesifikasi Pajak.

Direktur Jenderal Pajak. Surat Edaran Ditjen Pajak No. SE 98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-60/PJ/2013 Tentang Pengawasan dan Pengelolaan Basis Data Wajib Pajak.

Direktur Jenderal Pajak. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.04/2008 Tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Direktur Jenderal Pajak. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No.SE-05/PB/2007 Tentang Implementasi Penerimaan Negara.

Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*:Bee Media Indonesia

Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*.Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Haryanto, Suhadak & H, Siti Ragil. 2014. “ Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemeberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Bada.” *Jurnal Administrasi Bisnis (JIB)*. Vol 10. No.1 Mei 2014.

Herryanto, M & Toly .A.A. (2013). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.” *Tax & accounting review*, Vol.1 No.1.

Hernardi, Irman. 2012. Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. Hlm1-30.

Hidayat, Rudi & Cheisviyanny Charoline. 2013. “Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak”. *Jurnal WRA*. Vol.1, No.1, April 2013.

<http://www.pajak.go.id/>

<http://junaidichaniago.wordpress.com>

Ilyas W B & Burton Richard, 2012. *Manajemen Sengketa Dalam Pungutan Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Komarawati, Dewi Rina & Mukhtaruddin. 2012. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak di Kabupaten Lahat. *Hal 1-13*.

Lainutu, Amina. 2013. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh 21 Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal Emba Vol.1 No.3 2013*. Manado: Universitas Samratulangi Manado.

Listyaningtyas, Ellya Florentin. 2012. "Efektifitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak Studi Kasus di KPP Tulungagung." *Jurnal Akuntansi UNESA*. Vol.1 No.1.2012. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

Mahendra, Putu Putra dan Sukartha, I Made. (2013). "Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan." *E-journal Akuntansi Universitas Udayana*. ISSN 2302-8556.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi Yogyakarta : Yogyakarta.

Nasution, dkk. 2012. "Pengaruh Inflasi, Jumlah Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Padang." *Hal 1-13*.

Nanik, Fitriani. 2013. "Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Penerbitan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Bantul." *Jurnal Akuntansi*. Vol.1.No.2. Desember 2013.

Pasaleng, dkk. 2013. “Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.” *Jurnal EMBA* Vol.1 No.4 Desember 2013 Hal 2371-2381.

Pemerintah RI. Peraturan Menteri Keuangan 82/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

Pemerintah RI. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Tugas dari KPP.

Pemerintah RI. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 Tentang Wajib Pajak Memenuhi Syarat Subjektif dan Objektif dan Mempunyai Kewajiban Memperoleh NPWP.

Pemerintah RI. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 28/PMK.03/2012 Tentang Tata cara Pemeriksaan Pajak.

Pemerintah RI. Peraturan Pemerintah Nomor. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Pemerintah RI. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan.

Pemerintah RI. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 183/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.

Pemerintah RI. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.

Pemerintah RI. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan

Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Pemerintah RI. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Pemerintah RI. Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pemerintah RI. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Pemerintah RI. Undang-undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009.

Pemerintah RI. Undang-undang Republik Indonesia Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007.

Purwono. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga

Paranoan, Laura Evalina, Wilipo & Eko Suprianto. 2015. “ Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.” *Jurnal Administrasi-Perpajaka (JAB)*.Vol.5 No. 2 2015

Putra, Firi & Irwandi Maulan, 2015. “Pengaruh Jumlah dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak dengan Pemoderasi Penghasilan Pajak Pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumsel dan Kepulauan Babel.” *Jurnal Akuntanika*, No.1 Vol.1 Januari-Juni 2015.

P.L, Fibria Anggraini & Waluyo. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.” *E-journal Magister Akuntansi Trisakti*. Vol 1. No.1 Feb 2014.Hal 51-68.

Perkembangan Penerimaan Pajak tersedia:
<http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286> (akses 21 November 2015).

Rahayu, Siti Kurnia dan Suhayati Ely. 2010. *Perpajakan Inodesia Teori dan Teknis Perhitungan*, Yogyakarta : Graha Ilmuh.

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Rustiyangshi, Sri. 2011. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak." *Widya Warta* No.02 Tahun xxxv Juli 2011.

Sekaran & Roger Bogie. 2012. *Research Method for Business*. New York: Ltd Publication.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung : Alfabeta.

Suhendra, Euphrasia & Susy (2015). "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan." *Jurnal Ekonomi Bisnis*. No.1 Vol.15.April 2010. Hal 58-65.

Simajuntak, Timbul & Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : Swadaya Grup.

Susanti, Erni, dkk. 2014. "Pengaruh Wajib Pajak Badan, Kepatuhan Wajib Pajak Badan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25/29 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru." *Jurnal FEKON*. Vol.1 No. 2 Oktober 2014.

Trisnayanti, Ida Ayu Ivon & I Ketut Jati. 2015. "Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)." *E-journal Universitas Udayana*. 31 2015 ISSN: 2302-8556

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia* .Jakarta : Salemba Empat

Waluyo. 2011 . *Perpajakan Indonesia Buku 1*, Edisi 10: Salemba Empat

Wildaniashri. 2013. Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Hal 1.12*

Yuliani, Agnes dan Herlina Lusmeida. 2013. “Analisis Pengaruh Rasio Camels Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2007-2011).” *DeReMa Jurnal Manajemen*, Vol. 8, No. 2.



UMMN